

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persana, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Latif, H. Abdul, *et al.*, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pramono, Widyono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta.
- 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- 2009 *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahim, Abdur, *et al.*, 2015, *Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, Intrans Institute, Malang.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, Maruarar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Sitanggang, Djernih, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Soejono dan Abdurrahman, H., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sulami, Akhiar, 1985, *Eksistensi Pidana Mati*, Aksara Persana, Jakarta.

Teguh, Harrys Pratama dan Usep Saepullah, 2016, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus: Penundaan Ekse Mati di Indonesia (Kasus: Tipikor, Narkoba, Terorisme, Pembunuhan dan Politik)*, Pustaka Setia, Bandung.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 176).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

### C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.

### D. Artikel dan Jurnal

Rudy Satriyo Mukantardjo, “*Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2005.

Mutiara Hikmah, “*Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No. 2, 2005.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Linda Suryani Widayati, “*Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?*”, Negara Hukum, Vol. 7, No. 2, 2019.

Mohammad Rezza Naufal, *et al.*, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Sujatmiko dan Willy Wibowo, “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021.

## E. Internet

Linda Novi., “Jejak Teror Pimpinan ISIS Indonesia Aman Abdurrahman”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1090200/jejak-teror-pimpinan-isis-indonesia-aman-abdurrahman>, pada tanggal 25 Juni 2021.

Yusron Fahmi, “Peluru Algojo Akhiri Hidup Gembong Narkoba Freddy Budiman 3 Tahun Lalu”, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4023679/peluru-algojo-akhiri-hidup-gembong-narkoba-freddy-budiman-3-tahun-lalu>, pada tanggal 25 Juni 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengertian Kejaksaan”, diakses dari [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1), pada tanggal 22 September 2021.

Chairul Huda, “Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, diakses dari <https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii2015/>, pada tanggal 22 September 2021.

Rizky Amalia Roifany, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015 tentang Batas Waktu Pengajuan Permohonan Grasi”, *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, diakses dari <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/140111100201>, pada tanggal 22 September 2021.

Dony Indra Ramadhan, “Komnas HAM Tolak Tuntutan Mati, Kajati Jabar: Sesuai Regulasi!”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5916791/komnas-ham-tolak-tuntutan-mati-kajati-jabar->

*sesuai-regulasi* pada tanggal 16 Februari 2022.

Rahel Narda Chaterine, “Bicara Hukuman Mati untuk Koruptor, Jaksa Agung: Efek Jera Sekaligus Upaya Preventif”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/18003361/bicara-hukuman-mati-untuk-koruptor-jaksa-agung-efek-jera-sekaligus-upaya>, pada tanggal 17 Februari 2022.

*Anonymus*, “Laporan Global Amnesty International Hukuman dan Eksekusi Mati 2020”, diakses dari [https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121\\_Death-Penalty-Report-2020\\_FINAL.pdf](https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121_Death-Penalty-Report-2020_FINAL.pdf), pada tanggal 3 Maret 2022.

Muhammad Permana, “Dituduh Mata-Mata Polisi, Narapidana Baru Dianiaya Sesama Penghuni Lapas Jember”, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/dituduh-mata-mata-polisi-narapidana-baru-dianiaya-sesama-penghuni-lapas-jember.html>, pada tanggal 4 Maret 2022.

Humas FH UI, “Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati”, diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/topo-santoso-media-indonesia-menyual-hukuman-mati/>, pada tanggal 15 Maret 2022.

Bambang Edy Permono, “Pengawasan pada Program Pembinaan Narapidana”, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>, pada tanggal 10 April 2022.